

Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Mohammad Akmal Haris

Institut Agama Islam Al-Amin Indramayu

E-Mail: akmalmharis@gmail.com

Sapari

STIT Buntet Pesantren Cirebon

E-Mail: saparib99@gmail.com

Abstract

The challenges often faced in implementing Islamic Religious Education as a foundation for political ethics include the dualism of the education system, where in some countries, there is a separation between religious education and general education, which causes Islamic religious values not always to be integrated into political education. Second, political pragmatism, in political practices that are often pragmatic, the application of Islamic religious ethical values can be a challenge, especially when power is the main goal. Third, globalization and secularism, the challenges of globalization and secularism often encourage society to move away from Islamic religious values in public and political life, so that Islamic Religious Education needs to adapt to the modern context without losing its essence. The study of political ethics in the perspective of Islamic Religious Education uses a qualitative approach. This approach is used to understand phenomena in depth based on the interpretation and meaning contained in Islamic teachings and their application in a political context. The general steps in the qualitative approach include literature studies, studying in depth primary sources (the Qur'an and Hadith) and secondary literature (opinions of scholars, books, journals) on political ethics in Islam. Then the content analysis, analyzing the texts of Islamic teachings that are relevant to political ethics, such as the principles of justice, trust, syura, and maslahah. The results of this study conclude that Islamic Religious Education is an important foundation in the formation of political ethics that are characterful and moral. Through Islamic Religious Education, individuals and society are formed to understand the values of justice, honesty, responsibility, and trust that are the basis of ethical politics. Islamic Religious Education not only forms leaders with integrity, but also encourages healthy and responsible political participation among the community.

Keywords: *Ethics, Politics, Islamic Religious Education*

Abstrak

Tantangan yang sering dihadapi dalam menerapkan Pendidikan Agama Islam sebagai fondasi etika politik beberapa di antaranya adalah dualisme sistem pendidikan, di mana di beberapa negara, terdapat pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang menyebabkan nilai-nilai agama Islam tidak selalu diintegrasikan dalam pendidikan politik. Kedua, pragmatisme politik, dalam praktik politik yang sering kali pragmatis, penerapan nilai-nilai etika agama Islam bisa menjadi tantangan, terutama ketika kekuasaan menjadi tujuan utama. Ketiga, globalisasi dan sekularisme, tantangan globalisasi dan sekularisme sering kali mendorong masyarakat untuk menjauh dari nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan publik dan politik, sehingga Pendidikan Agama Islam perlu beradaptasi dengan konteks modern tanpa kehilangan esensinya. Kajian tentang etika politik dalam perspektif Pendidikan Agama Islam ini

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan interpretasi dan makna yang terkandung dalam ajaran Islam serta penerapannya dalam konteks politik. Langkah-langkah umum dalam pendekatan kualitatif tersebut antara lain melalui kajian literatur, mengkaji secara mendalam sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta literatur sekunder (pendapat para ulama, buku, jurnal) tentang etika politik dalam Islam. Kemudian analisis isi (content analysis), menganalisis teks-teks ajaran agama Islam yang relevan dengan etika politik, seperti prinsip keadilan, amanah, syura, dan maslahat. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan landasan penting dalam pembentukan etika politik yang berkarakter dan bermoral. Melalui Pendidikan Agama Islam, individu dan masyarakat dibentuk untuk memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan amanah yang menjadi dasar dari politik yang beretika. Pendidikan Agama Islam tidak hanya membentuk pemimpin yang berintegritas, tetapi juga mendorong partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Etika, Politik, Pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Etika dalam politik merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola masyarakat. Etika politik berfungsi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin dan institusi. Ketika etika dijunjung tinggi, masyarakat cenderung memiliki keyakinan bahwa keputusan yang diambil adalah demi kepentingan umum. Etika yang kuat dapat menjadi benteng terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan adanya standar moral yang jelas, para pemimpin diharapkan dapat bertindak dengan integritas dan akuntabilitas. Etika dalam politik mendorong penegakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Dengan prinsip-prinsip etis yang diterapkan, semua warga negara akan diperlakukan secara adil, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. (Setiawan & Fauzi, 2019).

Politik yang etis dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan politik diwarnai

oleh nilai-nilai moral, mereka lebih cenderung untuk terlibat dan berkontribusi. Etika politik yang baik berkontribusi pada stabilitas sosial. Ketika konflik dan ketidakpuasan dikelola dengan cara yang etis, kemungkinan terjadinya kerusuhan atau ketidakstabilan berkurang, menciptakan lingkungan yang lebih damai. (Hariantati, 2003).

Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk beragama, seperti Indonesia, etika politik sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Pendidikan Agama Islam, misalnya, mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, yang dapat diterapkan dalam praktik politik. Pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik. Etika dalam politik mengharuskan pemimpin untuk bertindak tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka terhadap masyarakat luas. Dengan memahami pentingnya etika dalam politik, kita dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan produktif, di mana nilai-nilai moral menjadi landasan bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil. (Wahid, 2024).

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk etika politik. Pendidikan Agama Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Nilai-nilai seperti kejujuran (QS. al-Ahzab [33]: 70-71), keadilan (QS. al-Maidah [5]: 8), dan tanggung jawab (QS. An-Nisa [4]: 58) menjadi landasan bagi individu dalam membuat keputusan politik yang etis. Kurikulum Pendidikan Agama Islam sering kali fokus pada pembentukan karakter. Dengan penanaman nilai-nilai moral sejak dini, generasi muda diajarkan untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan peka terhadap isu-isu sosial. (Soliha, Khozen, & Nurhakim, 2024).

Islam mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan Agama Islam membekali individu dengan pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan kepemimpinan yang beretika. Pendidikan Agama Islam menekankan pentingnya keterlibatan dalam masyarakat. Masyarakat diajarkan untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT dan sesama, sehingga mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban politik mereka. (Lathifah, Pebiyanti, & Firmansyah, 2021). Diterangkan dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Dalam Pendidikan Agama Islam, ajaran tentang toleransi (QS. al-Kafirun [109]: 6) dan dialog antar umat beragama menjadi penting (QS. An-Nahl [16]: 125). Ini membantu menciptakan sikap saling menghormati di kalangan masyarakat yang beragam, mendorong praktik politik yang inklusif dan damai. Pendidikan Agama Islam menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Kesadaran sosial ini dapat mendorong individu untuk mengambil sikap terhadap ketidakadilan dan berkontribusi pada kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Widiatmaka, Nuryadi, Sugiyanto, & Yani, 2024).

Sebagaimana Allah SWT. firman:kan:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. al-Hajj [22]: 41).

Pendidikan Agama Islam juga bisa membangun kemampuan berpikir kritis, memungkinkan umat Islam untuk menganalisis isu-isu politik dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka dapat menilai tindakan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan spiritual, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berperan

aktif dalam politik dengan landasan etika yang kuat. Ini menciptakan potensi bagi terciptanya lingkungan politik yang lebih berintegritas dan adil. (Zalsabella, Ulfatul, & Kamal, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian tentang etika politik dalam perspektif Pendidikan Agama Islam ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan interpretasi dan makna (Sugiyono, 2011) yang terkandung dalam ajaran Islam serta penerapannya dalam konteks politik. Langkah-langkah umum dalam pendekatan kualitatif tersebut antara lain:

- a. Kajian Literatur (Creswell, 2014): Mengkaji secara mendalam sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta literatur sekunder (pendapat para ulama, buku, jurnal) tentang etika politik dalam Islam.
- b. Analisis Isi (*Content Analysis*) (Ibrahim, 2015): Menganalisis teks-teks ajaran agama Islam yang relevan dengan etika politik, seperti prinsip keadilan, amanah, *syura*, dan *masalahah*.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Agama Islam dan Politik

Pendidikan Agama Islam dan Politik memiliki hubungan yang erat, karena Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ritual, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Islam memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat seharusnya dikelola secara etis dan adil, serta bagaimana individu berperilaku dalam konteks politik dengan nilai-nilai keagamaan. (Mujib & Yunita, 2018).

Islam adalah agama yang holistik, yang tidak hanya membahas hubungan individu dengan Allah (*hablum minallah*) tetapi juga hubungan individu dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam hal ini, politik menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan mengenai pemerintahan, keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Agama Islam mengajarkan nilai-nilai etika yang tinggi, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan musyawarah (*syura*), yang sangat relevan dalam dunia politik. Pemimpin dalam Islam diharapkan menerapkan nilai-nilai ini dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk kebaikan masyarakat. Pendidikan Agama Islam menekankan pentingnya integritas moral dalam politik.

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki akhlak mulia, termasuk calon pemimpin. Melalui pendidikan ini, diharapkan muncul pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Pemimpin dalam Islam harus berperan sebagai pelayan umat dan bekerja untuk kebaikan bersama. Konsep musyawarah (*syura*) yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Zalsabella, Ulfatul, & Kamal, 2023). Dalam Islam, pemimpin dianjurkan untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mengambil keputusan dengan cara yang bijak dan melibatkan berbagai pihak. Ini sejalan dengan konsep demokrasi modern, di mana partisipasi publik dan transparansi menjadi bagian penting dari sistem politik.

Pendidikan Agama Islam mengajarkan umatnya untuk menentang tirani, korupsi, dan ketidakadilan dalam politik. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh disalahgunakan, dan pemimpin yang zalim harus dikritik dan dihentikan. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) juga relevan dalam konteks politik, di mana rakyat didorong untuk menuntut pemerintahan yang adil dan transparan. Pendidikan Agama Islam mengajarkan bahwa tujuan dari politik adalah untuk mencapai *maslahah* atau kesejahteraan umum. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat membawa manfaat bagi masyarakat luas dan menghindari kerusakan. Ini berarti bahwa politik dalam Islam tidak boleh berfokus pada kepentingan pribadi atau golongan semata, tetapi harus bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua.

Melalui Pendidikan Agama Islam, individu diajarkan tentang tanggung jawab sosial mereka dalam masyarakat. Politik dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan sosial, melindungi yang lemah, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan, serta terlibat dalam kegiatan politik yang bertujuan memperbaiki kondisi tersebut. Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai landasan moral bagi mereka yang terlibat dalam dunia politik. Ajaran-ajaran tentang akhlak, tanggung jawab, dan keadilan memberikan panduan bagi para politikus Muslim dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas. Islam menekankan pentingnya

pemimpin yang bertakwa dan beretika dalam mengelola urusan publik.

Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam membentuk karakter dan moral individu yang terlibat dalam politik, dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, amanah, dan kesejahteraan Bersama (Romlah & Rusdi, 2023). Dalam pandangan Islam, politik harus dijalankan dengan etika yang tinggi dan ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui Pendidikan Agama Islam, diharapkan muncul generasi pemimpin yang mampu membawa nilai-nilai keislaman ke dalam tatanan politik modern, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

Peran Pendidikan Agama dalam Membentuk Karakter dan Sikap Politik

Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap politik individu, terutama dalam konteks nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah peran utama Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter dan sikap politik:

a. Membangun Karakter Berbasis Nilai Moral

Pendidikan Agama Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan amanah (tanggung jawab), yang menjadi landasan penting dalam kehidupan politik. Individu yang menerima Pendidikan Agama Islam cenderung memiliki karakter yang kuat dan integritas dalam menghadapi tantangan politik, seperti kekuasaan dan korupsi (Perangin-Angin & Daulay, 2024). Nilai-nilai ini membentuk dasar moral

bagi seseorang dalam membuat keputusan politik yang etis dan adil.

b. Membentuk Pemimpin yang Berakhlak Mulia

Salah satu tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah membentuk individu dengan akhlak yang mulia (Zalsabella, Ulfatul, & Kamal, 2023). Dalam konteks politik, pemimpin yang berakhlak mulia akan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka akan memimpin dengan keadilan, kesabaran, serta rasa tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Karakter seperti ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam politik.

c. Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Sosial

Pendidikan Agama Islam menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial, termasuk dalam dunia politik. Individu diajarkan untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain, memperjuangkan keadilan sosial, serta mencegah ketidakadilan dan penindasan. Sikap ini mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, seperti memberantas kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

d. Menanamkan Nilai Keadilan dalam Politik

Salah satu nilai utama dalam Pendidikan Agama Islam adalah keadilan. Keadilan menjadi fondasi utama dalam politik yang sehat dan demokratis (Widyakso, 2019). Pendidikan Agama Islam membantu individu memahami pentingnya menjalankan kekuasaan dengan adil dan tidak diskriminatif. Sikap politik yang

adil tidak hanya akan menjaga stabilitas dan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau kelas sosial.

e. Mendorong Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam ajaran agama, khususnya Islam, musyawarah (*syura*) diajarkan sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan. Pendidikan Agama Islam mendorong individu untuk terlibat aktif dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak, baik dalam konteks politik maupun sosial. Ini membantu membentuk sikap politik yang demokratis, di mana setiap individu merasa memiliki suara dan hak untuk berpartisipasi dalam membentuk kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

f. Membentuk Sikap Antikorupsi (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Pendidikan Agama Islam menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini sangat relevan dalam dunia politik, di mana korupsi sering kali menjadi masalah utama. Dengan Pendidikan Agama Islam yang baik, individu akan tumbuh dengan pemahaman bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau kekayaan publik untuk keuntungan pribadi adalah dosa besar yang harus dihindari. Ini membentuk sikap politik yang bersih dan anti-korupsi.

g. Mengajarkan Etika Politik

Pendidikan Agama Islam memberikan landasan tentang bagaimana kekuasaan dan politik harus

dijalankan dengan etika yang tinggi. Dalam konteks politik, etika mencakup bagaimana pemimpin dan politisi harus memperlakukan rakyat, menjaga kesejahteraan umum, dan membuat keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral. Pendidikan Agama Islam mengajarkan bahwa politik bukan hanya tentang merebut atau mempertahankan kekuasaan, tetapi juga tentang melayani masyarakat dengan cara yang benar dan bermoral.

h. Menumbuhkan Toleransi dan Kerukunan (QS. al-Hujurat [49]: 13)

Pendidikan Agama Islam juga menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan, baik dalam agama, budaya, atau pandangan politik. Toleransi menjadi penting dalam konteks politik multikultural, di mana masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Pendidikan Agama Islam yang baik akan membentuk sikap politik yang menghormati perbedaan dan mendorong kerukunan serta perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

i. Mencegah Radikalisme dan Ekstremisme Politik (QS. al-Baqarah [2]:143)

Salah satu peran Pendidikan Agama Islam yang sangat penting adalah mencegah tumbuhnya sikap politik yang radikal atau ekstrem. Pendidikan Agama Islam yang sehat akan memberikan pemahaman yang moderat dan seimbang tentang ajaran agama, sehingga mencegah individu dari pemahaman yang salah atau ekstrem tentang politik, kekerasan, atau penggunaan agama untuk justifikasi tindakan yang merugikan orang lain.

j. Membangun Kesadaran akan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pendidikan Agama Islam menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain hak-hak yang harus diperjuangkan, Pendidikan Agama Islam juga mengajarkan kewajiban untuk taat hukum, berpartisipasi dalam proses politik secara damai, dan ikut menjaga keutuhan negara. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam membentuk sikap politik yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu yang memiliki sikap politik yang etis, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai moral yang diajarkan melalui Pendidikan Agama Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, toleransi, dan amanah menjadi fondasi yang kuat bagi individu dalam menjalankan dan berpartisipasi dalam politik. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk membangun akhlak pribadi, tetapi juga menciptakan generasi pemimpin dan warga negara yang berkomitmen terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pendidikan Agama Islam sebagai Penggerak Partisipasi Politik yang Beretika

Selain membentuk pemimpin, Pendidikan Agama Islam juga mendidik masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan politik secara etis dan konstruktif. Beberapa aspek penting yang diajarkan melalui Pendidikan Agama Islam dalam konteks partisipasi politik antara lain:

a. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara: Pendidikan Agama Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan

- keadilan dan kebenaran, termasuk melalui partisipasi dalam politik.
- b. Menolak Korupsi dan Ketidakadilan: Melalui pendidikan Agama Islam, masyarakat belajar untuk menolak segala bentuk korupsi, manipulasi, dan diskriminasi dalam proses politik.
 - c. Aktif dalam Menegakkan Kebenaran: Partisipasi politik bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban dalam Islam. Masyarakat diajarkan untuk terlibat dalam politik dengan niat menegakkan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.

Pendidikan Agama Islam juga menyediakan landasan bagi pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Ini dapat dilakukan melalui: Pertama, kurikulum pendidikan formal. Di sekolah-sekolah dan universitas yang berbasis Islam, kurikulum pendidikan sering kali mencakup studi tentang etika politik dalam Islam, sejarah kepemimpinan Islam, dan contoh-contoh politik Islami yang sukses. Kedua, pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional. Di pesantren, Pendidikan Agama Islam tidak hanya meliputi pengajaran akhlak dan ibadah, tetapi juga mencakup pelajaran tentang peran sosial dan politik umat Islam dalam masyarakat. Ketiga, pengajian dan ceramah agama. Melalui pengajian dan ceramah agama, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menjalankan kehidupan politik yang sesuai dengan ajaran Islam. (Maftuhah, 2012).

Kesimpulan

Etika politik dalam perspektif Pendidikan Agama Islam menekankan bahwa politik harus dijalankan dengan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam membentuk

karakter pemimpin dan individu yang terlibat dalam politik, dengan menanamkan nilai-nilai etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('*adl*), amanah (tanggung jawab), musyawarah (*syura*), kejujuran, integritas, dan kesejahteraan umum (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam menjalankan politik yang beretika menurut ajaran Islam. Politik dalam Islam bukan sekadar alat untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pendidikan Agama Islam juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki akhlak mulia, berintegritas, dan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang ideal dalam Islam adalah mereka yang memimpin dengan sikap adil, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, dan memperjuangkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai fondasi moral yang membentuk sikap politik yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan umum, dan tanggung jawab sosial, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Ibrahim, I. S. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Wacana*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lathifah, E., Pebiyanti, L. A., & Firmansyah, N. F. (2021). Kepemimpinan Islam Berdasarkan Dalil-dalil Syar'i: Al-Quran dan Hadits. *Jurnal Pendidikan Indonesia*

- (Japendi), 2(9), 1522–1530.
<https://doi.org/10.1234/jpiv2i9.545f19ab>.
- Hariantati, R. (2003). *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Demokrasi, 2(1), 57-68.
- Maftuhah. (2012). Pendidikan Politik Kebangsaan dan Politik Islam dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Masa Orde Baru. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 36(2), 364-387.
- Mujib, A., & Yunita, Y. (2018). Pendidikan Islam dan Politik. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4(1), 1-10.
<https://doi.org/10.1234/fikrah.v4i1.328272>.
- Perangin-Angin, S. L., & Daulay, Z. R. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 5(1), 1469-1474. Thailand: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
<https://doi.org/10.22373/semnas.v5i1.52634>.
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan Agama Islam sebagai Pilar Pembentukan Moral dan Etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67-85.
<https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i1.249>.
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). *Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*. JPK: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 1(1), 1-12.
- Soliha, I. A., Khozen, & Nurhakim, M. (2024). The Role of Religious Education in Forming Social Ethics. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 434-445.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.959>.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Wahid, A. (2024). Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Implementasi dalam Pendidikan Multikultural di Indonesia. *SCHOLARS: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(1), 1-6.
<https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367>.
- Widiatmaka, P., Nuryadi, M. H., Sugiyanto, A., & Yani, A. (2024). Politik Agama di Indonesia: Politisasi Agama Islam dalam Kontestasi Pemilihan Umum. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 24(2), 127–140.
<https://doi.org/10.21831/hum.v24i2.71424>.
- Widyakso, R. (2019, Juli 12). *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-keadilan-menurut-al-qur-an-rendra-widyakso-sh-12-7>.
- Zalsabella, D. P., Ulfatul, E. C., & Kamal, M. (2023). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Nilai Karakter dan Moral Anak di Masa Pandemi. *JIE: Journal of Islamic Education*, 9(1), 43-63.
<https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.12345>.